



IKHTISAR LHKPN a.n ROSADI
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2024)
NIK 1571010512740081

1. DATA PRIBADI

Nama	:	ROSADI
NIK	:	1571010512740081
No KK	:	1571010310070002
NPWP	:	482583820331000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	SAROLANGUN/5 Desember 1974
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	JL. DR. TAZAR BLOK H NO 5A, TELANAI PURA, KOTA JAMBI, JAMBI
Nomor Handphone	:	081273040271
Email	:	ROSADIMAB@gmail.com
NHK	:	907506
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jabatan	:	KEPALA BIDANG - BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tanggal Lapor	:	31 Desember 2024
Tanggal Kirim	:	26 Februari 2025
Status	:	Proses Verifikasi



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	NURJANNAH.P	ISTRI	BANDAR RAKYAT , 21 Juli 1975 / Perempuan	IBU RUMAH TANGGA	JL. DR. TAZAR BLOK H NO 5A, Kelurahan BULURAN KENALI, Kecamatan TELANAI PURA, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
2	FAJAR ADRIANSYAH	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 25 Juli 2002 / Laki-Laki	MAHASISWA	JL. DR. TAZAR BLOK H NO 5A, Kelurahan BULURAN KENALI, Kecamatan TELANAI PURA, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
3	REYHAN GEOVANIE ADROJA	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 9 Juni 2007 / Laki-Laki	PELAJAR	JL. DR. TAZAR BLOK H NO 5A, Kelurahan BULURAN KENALI, Kecamatan TELANAI PURA, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
4	ADELIA CHINTYA RAMADHANI	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 13 Juli 2013 / Perempuan	PELAJAR	JL. DR. TAZAR BLOK H NO 5A, Kelurahan BULURAN KENALI, Kecamatan TELANAI PURA, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA BIDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : DR. TAZAR BLOK NO. 5A PERUM PERMATA BULURAN PERMAI KEL. BULURAN KENALI KEC.	Tanah: 108 m ² Bangunan: 120 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 1247 Atas Nama: PN YANG	Rp. 300.000.000	Rp. 350.000.000	UBAH



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	TELANIPURA KOTA JAMBI Kel. / Desa : BULURAN KENALI Kecamatan : TELANAIPURA Kab. / Kota : KOTA JAMBI Prov. / Negara : JAMBI / INDONESIA		BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2005			
Sub Total					Rp. 350.000.000	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS



NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK 9 JAMBI	Nomor : 102257774 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 1.000.000	UBAH
Sub Total				Rp. 1.000.000	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BANK 9 JAMBI	SK	Rp. 125.000.000	Rp. 35.000.000
Sub Total				Rp. 125.000.000	Rp. 35.000.000

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
----	------------------	----------------------	----------



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 83.208.986	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 83.208.986	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 15.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 0
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 15.000.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 351.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 316.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkp.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ERI ARGAWAN
- Jabatan** : KEPALA UNIT
- NHK** : 841811

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	248.000.000
1. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.		
13.000.000		
2. MOBIL, MITSUBHISI / X PANDER EXCEED Tahun 2019, HASIL		
SENDIRI Rp. 235.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	333.800.000
III. HUTANG	Rp.	10.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	323.800.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ERWIN EFFENDY
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 729147

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	229.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RAIZE 1.0 T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 229.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.020.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	278.020.000
III. HUTANG	Rp.	36.385.627
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	241.634.373

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : SRI PURNAMA SYAM
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 733770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	217.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI OUT LANDER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.278.143
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	676.278.143
III. HUTANG	Rp.	81.530.125
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	594.748.018

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFRIAL.MY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 737239

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **537.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 509 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 507 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
3. Tanah Seluas 523 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **56.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI DR 412 (4X2) M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FD110 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **9.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.050.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **603.050.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **603.050.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERVIN APRIANTI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 843680

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **16.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/800 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , Rp. 10.000.000.000
3. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/800 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.000.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT/JEEP/MP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARTOP/MINIBUS Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ/ MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **13.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **17.313.000.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 17.313.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : NOVITA ERLINDA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 833070

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, VARIO NC11A3CB A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	196.000.000

III. HUTANG **Rp.** **714.000.462**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-518.000.462**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.